

## DIMENSI AKSESIBILITAS DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERKELANJUTAN

Petrus Atong<sup>1\*</sup>, Emiliani Nindy Diana Rusega Sim<sup>2\*</sup>

<sup>1\*</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: [petrus.atong@gmail.com](mailto:petrus.atong@gmail.com)

<sup>2\*</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email : [emilianinindy025@gmail.com](mailto:emilianinindy025@gmail.com)

**Abstract:** *Accessibility is one of the key factors in the sustainable development of tourism villages, as it determines the ease with which tourists can reach destinations, obtain information, and utilize available tourism services. However, existing studies on tourism village accessibility have predominantly focused on physical aspects, while other dimensions have not been comprehensively synthesized. This study aims to identify and analyze the dimensions of accessibility in sustainable tourism village development using a Systematic Literature Review (SLR) approach based on scientific articles retrieved from Google Scholar, GARUDA, and SINTA databases. The analysis was conducted by classifying the selected studies according to themes related to tourism village accessibility. The findings reveal that tourism village accessibility consists of six main dimensions: physical-spatial accessibility, transportation connectivity, information and digital accessibility, time and cost affordability, safety, comfort and inclusiveness, and governance and sustainability. These six dimensions are interconnected and collectively contribute to the economic, socio-cultural, environmental, and institutional sustainability of tourism villages. Therefore, accessibility development should be implemented in an integrated manner through the provision of adequate infrastructure, the strengthening of transportation systems, the digitalization of information services, the improvement of service quality, the enhancement of governance, and active community participation. Such an approach will enable tourism villages to improve community welfare while preserving environmental sustainability and local cultural values.*

**Keywords:** *accessibility; tourism village; sustainable development*

**Abstrak:** Aksesibilitas merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan karena menentukan kemudahan wisatawan dalam mencapai destinasi, memperoleh informasi, serta memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia. Namun, penelitian mengenai aksesibilitas desa wisata masih didominasi pembahasan pada aspek fisik, sementara dimensi lainnya belum banyak disintesis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis dimensi-dimensi aksesibilitas dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap artikel ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar, GARUDA, dan SINTA. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan aksesibilitas desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas desa wisata terdiri atas enam dimensi utama, yaitu aksesibilitas fisik-spasial, konektivitas transportasi, akses informasi dan digital, keterjangkauan waktu dan biaya, keamanan, kenyamanan dan inklusivitas, serta tata kelola dan keberlanjutan. Keenam dimensi tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan kelembagaan desa wisata. Oleh karena itu, pengembangan aksesibilitas perlu dilakukan secara terpadu melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, penguatan sistem transportasi, digitalisasi informasi, peningkatan

kualitas pelayanan, penguatan tata kelola, serta pelibatan masyarakat agar pengembangan desa wisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan nilai budaya lokal.

**Kata Kunci:** aksesibilitas; desa wisata; pembangunan berkelanjutan

## PENDAHULUAN

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki program pengembangan wilayah unggulan berupa Desa Wisata. Desa wisata dianggap sebagai salah satu alternatif kebijakan yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa paling cepat (Siregar & Priyatmoko, 2022, dikutip dalam Sim, 2025).

Sebuah desa dapat dijadikan sebagai destinasi wisata tidak terlepas dari alasan masih dipertahankannya keaslian budaya, adat istiadat, kebiasaan kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang masih tradisional, arsitektur tradisional, serta tata ruang khas desa. Selain itu, desa wisata terkadang berpotensi lebih mudah mendapatkan “sentuhan marketing” dari komponen pariwisata yang terdiri dari atraksi, akomodasi, makanan-minuman, oleh-oleh dan layanan wisata lainnya (Priasukmana & Mulyadin, 2001, dikutip Rahayu dkk, 2024).

Selain karna kondisi “alami” yang masih terjaga di desa, terdapat beberapa kriteria dalam menetapkan desa untuk menjadi desa wisata yaitu adanya potensi daya tarik wisata, terbentuknya komunitas atau kelompok masyarakat, adanya potensi sumber daya manusia lokal yang dapat diberdayakan dalam pengembangan desa wisata, adanya tata kelola kelembagaan, adanya dukungan terhadap sarana prasarana kegiatan wisata dan pengembangan pasar wisatawan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019).

Desa wisata sebagai objek wisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karna pengaruhnya dalam menyediakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah apabila objek wisata ramai dikunjungi oleh wisatawan (Ritzkal dkk, 2018). Salah satu faktornya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas memainkan peran penting dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan (Azizi dkk, 2025).

Kondisi ini tidak terlepas dari realitas bahwa wisatawan yang akan mengunjungi lokasi terlebih dulu memperhatikan akses dan kondisi jalan yang akan dilewatinya. Pada umumnya, wisatawan lebih tertarik untuk menggunakan jalan yang lebar, beraspal dan tidak berlubang. Faktor tambahan lainnya adalah waktu tempuh dan jarak menuju lokasi (Wijaya, 2020, dikutip dalam (Napu dkk, 2024).

Dengan demikian, aksesibilitas berperan sebagai penghubung antara desa wisata dan minat kunjungan wisatawan. Desa wisata yang menarik belum tentu mampu menghasilkan sebuah manfaat apabila akses wisata sulit dijangkau, tidak memiliki pilihan transportasi, tidak tersedianya informasi mengenai rute perjalanan menuju desa wisata, biaya perjalanan yang terlalu tinggi hingga tidak terjaminnya keamanan fasilitas yang tersedia. Kesiapan desa wisata terhadap aksesibilitas perlu dipahami melalui fasilitas penunjang, prasarana, informasi, waktu dan pengelolaan aksesibilitas,

sehingga pemahaman terhadap akses bukan hanya berkaitan jalan yang bagus saja (Delamartha dkk, 2021).

Ketidakmampuan memahami aksesibilitas dalam konteks yang luas, akan berakibat pada pembangunan infrastruktur yang tidak menjawab kebutuhan dasar pada pengembangan desa wisata. Temuan pada Desa Wisata Batulayang menunjukkan bahwa jarak dan moda transportasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berkunjung dibandingkan dengan kondisi jalan dan waktu perjalanan. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa kualitas akses ditentukan oleh hubungan antar unsur, tidak hanya dipengaruhi oleh satu indikator tunggal saja (Purnama & Ardiansyah, 2024).

Aksesibilitas juga berkaitan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat. Masyarakat yang berpartisipasi sejak perencanaan hingga pelaksanaan dapat memungkinkan adanya pengelolaan akses yang sesuai dengan kebutuhan lokal, pembagian manfaat, kapasitas pelayanan sektor wisata dan tata ruang desa. Sebagai contoh, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Wae Rebo menunjukkan pentingnya fasilitas, peningkatan terhadap kapasitas pengelola serta keterlibatan masyarakat dalam tahapan pengembangan desa wisata. Sehingga pembangunan akses yang berkelanjutan perlu memperhatikan siapa yang mengoperasikan, memelihara dan memperoleh manfaat dari sistem aksesibilitas tersebut (Suhandi dkk, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan : (1) Mengidentifikasi dimensi aksesibilitas yang sesuai dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan;

dan (2) Menjelaskan hubungan setiap dimensi dengan keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan kelembagaan.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur naratif dengan sintesis tematik. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk mengintegrasikan konsep, indikator, temuan empiris dan rekomendasi yang tersebar dalam penelitian mengenai desa wisata di Indonesia.

Peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang relevan sebagai hasil penelusuran terhadap publikasi dilakukan melalui portal Science and Technology Index (SINTA), Garuda serta lama resmi jurnal yang berkaitan. Kata kunci yang digunakan meliputi "aksesibilitas desa wisata", "desa wisata berkelanjutan", "komponen destinasi wisatawan", "pengelolaan desa wisata", "pariwisata berbasis masyarakat".

Informasi-informasi tersebut kemudian dikutip, dianalisis dan dirangkum sehingga menjadi sebuah hasil penelitian yang utuh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Aksesibilitas dalam Sistem Desa Wisata

Aksesibilitas dalam desa wisata dipahami sebagai kemudahan bagi wisatawan, masyarakat, tenaga kerja, pelaku usaha hingga layanan pendukung lainnya untuk mencapai

destinasi wisata, melakukan aktivitas wisata, mendapatkan informasi, menggunakan fasilitas serta meninggalkan lokasi wisata secara aman.

Berdasarkan pada konteks atribut destinasi wisata, dimensi aksesibilitas secara sistemik berkaitan dengan daya tarik, amenitas, akomodasi dan layanan pendukung. Daya tarik wisata yang kuat memerlukan sistem akses yang mampu membawa pengunjung secara efisien; amenitas harus dapat dicapai dan digunakan oleh wisatawan; sedangkan pada aspek kelembagaan diperlukan untuk pengatur arus informasi, jaminan keselamatan, pemeliharaan dan hubungan antar pelaku wisata. Pengelolaan desa wisata perlu menyatukan komponen destinasi ke dalam sistem kerja yang konsisten, bukan hanya mengembangkan setiap komponen secara terpisah saja (Herman dkk, 2023).

Pengembangan pada komponen pariwisata di Desa Wisata Jambu juga menunjukkan perlunya intervensi strategis yang menghubungkan atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitas dan layanan pendukung. Keterkaitan komponen atau unsur-unsur tersebut menjadi penting diperhatikan karena apabila salah satu unsur mengalami kendala atau hambatan maka dapat menurunkan kualitas keseluruhan pengalaman wisatawan. Hal tersebut

dapat menimbulkan implikasi pada manfaat ekonomi yang diperoleh akan terbatas (Wulandari dkk, 2025).

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, aksesibilitas memiliki dua sisi. Perbaikan akses dapat memperluas pasar wisata, menurunkan biaya transaksi, meningkatkan penjualan usaha masyarakat lokal yang berdekatan dengan lokasi wisata dan memudahkan layanan publik. Seluruh manfaat baik tersebut tidak dapat tercapai apabila akses dibangun tanpa memperhatikan daya dukung yang dapat mendorong kepadatan pemukiman, konversi lahan, sampah, kemacetan dan komersialisasi berlebihan. Oleh karena itu, tujuan kebijakan dibuat bukan hanya untuk memaksimalkan arus kunjungan saja, tetapi juga menciptakan akses yang tepat guna, terkendali, inklusif dan selaras dengan kapasitas desa.

## 2. Enam Dimensi Aksesibilitas

### a. Akses Fisik Spasial

Dimensi fisik spasial mencerminkan tingkat kemudahan akses menuju dan di dalam Kawasan desa wisata. Dimensi ini meliputi kondisi jalan, jaringan transportasi, jembatan, drainase, area parkir, jalur pejalan kaki, rambu penunjuk arah, serta konektivitas antar objek wisata. Infrastruktur tersebut merupakan prasyarat penting dalam mendukung aktivitas pariwisata. Namun, keberhasilannya tidak hanya

ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur saja tetapi juga oleh kesesuaiannya kondisi geografis, karakteristik desa, kapasitas kendaraan, jumlah pengunjung dan kelestarian lingkungan.

Peningkatan akses jalan menuju desa wisata tidak selalu harus dilakukan melalui pelebaran atau pengerasan jalan secara menyeluruh. Desa wisata yang berada di kawasan pegunungan atau kawasan dengan nilai ekologis tinggi, perlu diperhatikan pengembangan aksesibilitas yang berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain penyediaan area parkir di luar kawasan inti desa, pengadaan kendaraan berkapasitas kecil sebagai transportasi penghubung, membangun jalur pejalan kaki yang aman, pembatasan terhadap kendaraan beroda yang masuk ke kawasan wisata bahkan jika perlu menerapkan sistem lalu lintas satu arah. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kemudahan akses wisatawan tanpa mengurangi kualitas lingkungan dan sebagai bentuk antisipasi agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat setempat.

Meskipun demikian, kualitas infrastruktur tetap menjadi faktor yang menentukan dalam pengembangan desa wisata. Infrastruktur yang belum memadai dapat menjadi penghambat untuk efektivitas aspek pengembanan

lainnya, misalnya promosi, pelayanan wisata, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian di Desa Wisata Ngargoretno, yang di mana dimensi infrastruktur hanya memperoleh nilai keberlanjutan sebesar 47,01% atau berada pada kategori kurang berkelanjutan. Sedangkan dimensi kelembagaan menunjukkan capaian yang lebih baik yaitu 74,32% pada kategori cukup berkelanjutan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan infrastruktur masih menjadi prioritas untuk mendukung pengembangan wisata yang berkelanjutan (Marhesa dkk, 2024).

#### b. Konektivitas Transportasi

Konektivitas transportasi menunjukkan kemudahan wisatawan dalam mencapai desa wisata melalui ketersediaan moda transportasi yang memadai. Aspek ini mencakup keberadaan angkutan umum atau transportasi alternatif, keterhubungan dengan terminal, stasiun, atau pusat kota, jadwal dan frekuensi layanan, kapasitas angkut, serta kemudahan perjalanan dari titik kedatangan menuju lokasi wisata. Meskipun suatu desa telah didukung oleh kondisi jalan yang baik, aksesibilitas tetap menjadi kendala apabila wisatawan yang tidak menggunakan kendaraan pribadi tidak

memiliki pilihan transportasi yang mudah dan terjangkau.

Penelitian di Desa Wisata Batulayang menunjukkan bahwa jarak tempuh dan ketersediaan moda transportasi berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung wisatawan. Sebaliknya, kondisi jalan dan waktu tempuh tidak memberikan pengaruh secara parsial. Secara simultan, aksesibilitas mampu menjelaskan sebesar 73,4% variasi minat kunjungan wisatawan. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan wisatawan untuk berkunjung lebih dipengaruhi oleh kemudahan memperoleh transportasi dan menjangkau lokasi wisata dibandingkan hanya oleh kualitas infrastruktur jalan (Purnama & Ardiansyah, 2024).

Oleh karena itu, pengembangan konektivitas transportasi di desa wisata perlu diarahkan pada penyediaan layanan yang mudah diakses oleh seluruh wisatawan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain menjalin kerja sama dengan penyedia angkutan lokal, menyediakan layanan antar-jemput berdasarkan pemesanan, menghubungkan desa wisata dengan terminal atau stasiun terdekat, menyediakan informasi tarif yang transparan, serta mengembangkan penyewaan kendaraan ramah lingkungan. Selain meningkatkan kemudahan akses wisatawan, strategi

tersebut juga dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berpotensi meningkatkan kemacetan dan pencemaran lingkungan.

#### c. Akses Informasi dan Digital

Akses informasi dan digital berkaitan dengan kemudahan wisatawan memperoleh informasi sebelum maupun selama melakukan kunjungan ke desa wisata. Informasi yang dibutuhkan meliputi lokasi destinasi, peta dan rute perjalanan, pilihan transportasi, jadwal operasional, tarif masuk, kapasitas kunjungan, kontak pengelola, sistem reservasi, aturan kunjungan, kondisi cuaca, hingga informasi mengenai keselamatan dan keadaan darurat. Informasi tersebut harus akurat, mudah dipahami, selalu diperbarui, serta tersedia melalui berbagai media, baik digital maupun non-digital, sehingga dapat membantu wisatawan merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

Informasi diposisikan sebagai salah satu aspek penting dalam aksesibilitas destinasi wisata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh informasi memiliki peran yang sama pentingnya dengan ketersediaan infrastruktur fisik. Wisatawan tidak hanya membutuhkan akses jalan yang baik, tetapi juga

kepastian mengenai lokasi, biaya, jadwal, serta berbagai informasi pendukung lainnya. Informasi yang tidak lengkap atau sulit diperoleh dapat menimbulkan ketidakpastian, meningkatkan biaya pencarian informasi, dan pada akhirnya mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung (Delamartha dkk, 2021).

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi desa wisata untuk meningkatkan kualitas layanan informasi melalui website, media sosial, peta digital, maupun sistem reservasi secara daring. Namun, penyediaan informasi digital tidak dapat sepenuhnya menggantikan media informasi konvensional. Kondisi jaringan internet yang belum merata di beberapa wilayah serta perbedaan kemampuan wisatawan dalam memanfaatkan teknologi menjadi alasan pentingnya penyediaan informasi secara luring. Oleh karena itu, media digital perlu didukung dengan papan penunjuk arah, pusat informasi, nomor layanan yang aktif, serta materi informasi yang dapat diakses tanpa koneksi internet. Selain itu, informasi yang disampaikan kepada wisatawan harus menggambarkan kondisi destinasi secara nyata agar tidak menimbulkan ekspektasi yang berlebihan dan tetap menjaga kepercayaan pengunjung.

#### d. Keterjangkauan Waktu dan Biaya

Aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan kemudahan mencapai suatu destinasi, tetapi juga dengan keterjangkauan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh wisatawan. Dimensi ini mencakup lama perjalanan, waktu tunggu, ketepatan jadwal transportasi, biaya perjalanan, tarif parkir, harga tiket masuk, biaya transportasi lanjutan, serta kejelasan informasi mengenai tarif. Meskipun jarak suatu desa wisata relatif dekat, wisatawan tetap dapat mengalami kesulitan apabila harus berganti moda transportasi berkali-kali, menghadapi waktu tunggu yang lama, atau memperoleh informasi tarif yang tidak pasti.

Aspek waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesiapan aksesibilitas destinasi wisata (Delamartha dkk, 2021). Namun demikian, penelitian di Desa Wisata Batulayang menunjukkan bahwa waktu perjalanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat berkunjung wisatawan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa wisatawan masih bersedia menempuh perjalanan yang relatif lama apabila tersedia moda transportasi yang memadai, jadwal perjalanan dapat diprediksi, serta pengalaman wisata yang diperoleh dianggap sebanding dengan waktu yang dikeluarkan (Purnama & Ardiansyah, 2024).

Untuk meningkatkan keterjangkauan destinasi, pengelola desa wisata perlu menerapkan strategi yang memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan informasi tarif yang transparan, penyusunan paket wisata yang menggabungkan layanan transportasi dan aktivitas wisata, penyediaan beberapa pilihan layanan sesuai kemampuan ekonomi wisatawan, serta koordinasi jadwal transportasi untuk mengurangi waktu tunggu. Selain meningkatkan kenyamanan wisatawan, kebijakan tersebut juga harus tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal dengan menetapkan tarif yang wajar sehingga mampu memberikan manfaat bagi penyedia jasa tanpa menimbulkan persaingan harga yang merugikan (Delamartha dkk, 2021; Purnama & Ardiansyah, 2024).

e. Keselamatan, Kenyamanan dan Inklusivitas

Dimensi keamanan, kenyamanan, dan inklusivitas berkaitan dengan kemampuan desa wisata dalam menyediakan lingkungan yang aman dan mudah diakses oleh seluruh wisatawan. Aspek ini meliputi keselamatan lalu lintas, penerangan jalan, kondisi jalur wisata, pemisahan jalur pejalan kaki dan kendaraan, area istirahat, fasilitas sanitasi, layanan

pertolongan pertama, jalur evakuasi, mitigasi bencana, perlindungan dari cuaca, serta kemudahan akses bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, aksesibilitas tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas tersebut dapat digunakan secara aman, nyaman, dan mandiri oleh seluruh kelompok pengguna.

Penerapan prinsip desain universal menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas di desa wisata. Implementasinya dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing desa, misalnya melalui penyediaan informasi mengenai tingkat kesulitan jalur, pemasangan pegangan tangan pada jalur tertentu, penggunaan permukaan jalan yang tidak licin, pembangunan jalur landai pada lokasi yang memungkinkan, penyediaan toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas, area istirahat, serta layanan pendamping bagi wisatawan yang membutuhkan bantuan. Pada objek wisata alam yang memiliki keterbatasan untuk dimodifikasi, pengelola perlu memberikan informasi mengenai tingkat risiko dan menyediakan alternatif aktivitas yang tetap dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung.

Selain aspek fisik, kenyamanan wisatawan juga dipengaruhi oleh

kondisi sosial di kawasan desa wisata. Pengelolaan arus kunjungan, penyampaian informasi mengenai etika berkunjung, terutama ketika memasuki kawasan permukiman atau tempat yang memiliki nilai budaya dan religius, pengendalian kebisingan, serta penyediaan mekanisme penyampaian keluhan merupakan bagian penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas.

Pendekatan tersebut tidak hanya memberikan rasa nyaman bagi wisatawan, tetapi juga menjaga hak, privasi, dan kualitas hidup masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola desa wisata. Dengan demikian, konsep inklusivitas dalam desa wisata tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan wisatawan, tetapi juga pada perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal sebagai bagian dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

#### f. Tata Kelola, Pemeliharaan dan Kesesuaian Ekologis

Dimensi tata kelola berperan penting dalam menjamin keberlanjutan pengembangan aksesibilitas di desa wisata. Keberadaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa didukung oleh sistem pengelolaan yang baik. Dimensi ini mencakup pembagian tugas dan kewenangan antar pemangku

kepentingan, penyusunan standar pelayanan, penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan, koordinasi antarinstansi, pengelolaan data, kemitraan dengan berbagai pihak, keterlibatan masyarakat, penanganan keluhan wisatawan, hingga mekanisme pengendalian jumlah kunjungan sesuai daya dukung kawasan. Tata kelola yang efektif menjadi fondasi dalam menjaga kualitas pelayanan sekaligus menjamin keberlanjutan pengembangan desa wisata.

Strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi tidak hanya bergantung pada potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan, ketersediaan fasilitas, kapasitas sumber daya manusia, profesionalisme pengelola, serta kerja sama antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan perlu menjadi prioritas agar pengelolaan desa wisata dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan (Achsa dkk, 2024).

Selain penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan desa wisata. Pengembangan keterampilan, kewirausahaan, dan kemampuan memberikan pelayanan kepada

wisatawan dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pariwisata. Melalui peningkatan kapasitas tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan (Budiarta dkk, 2023)

Partisipasi masyarakat juga perlu diwujudkan secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan desa wisata. Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam proses konsultasi, tetapi juga berperan dalam mengidentifikasi permasalahan aksesibilitas, menentukan kebutuhan infrastruktur, menyusun aturan pengelolaan, mengelola transportasi lokal, memelihara fasilitas, serta melakukan pemantauan terhadap dampak kegiatan pariwisata. Penelitian di Desa Wisata Wae Rebo menunjukkan bahwa proses partisipatif yang didukung dengan peningkatan kapasitas masyarakat mampu memperkuat pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism) secara berkelanjutan (Suhandi dkk, 2022).

Pengembangan aksesibilitas juga perlu memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan wisata maupun kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan

infrastruktur dan pengelolaan akses wisata harus mempertimbangkan jumlah kendaraan, tingkat kebisingan, emisi, penggunaan lahan, kondisi jalur wisata, volume sampah, kualitas air, serta kepadatan pengunjung pada lokasi yang sensitif. Apabila indikator-indikator tersebut menunjukkan tekanan yang semakin tinggi, pengelola dapat menerapkan berbagai langkah pengendalian, seperti sistem reservasi, pembatasan jumlah pengunjung, pengalihan rute perjalanan, penyediaan layanan shuttle, atau penutupan sementara kawasan wisata. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan, kepentingan masyarakat lokal, dan kelestarian lingkungan sehingga pengembangan desa wisata dapat berlangsung secara berkelanjutan.

### 3. Hubungan Aksesibilitas dengan Keberlanjutan

Dalam dimensi ekonomi, aksesibilitas berperan penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa wisata. Akses yang mudah memungkinkan wisatawan mencapai destinasi dengan lebih efisien sehingga memperluas peluang usaha masyarakat, seperti penyediaan transportasi lokal, jasa pemandu wisata, kuliner, homestay, serta penjualan produk unggulan desa. Selain itu, aksesibilitas yang baik juga

memperlancar distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan pariwisata. Namun, manfaat ekonomi tersebut akan lebih optimal apabila pengelolaan layanan wisata melibatkan masyarakat lokal dan didukung oleh sistem pembagian manfaat yang adil. Inovasi dalam pengelolaan desa wisata diperlukan agar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat desa (Rahmat & Cahyadi, 2019).

Pada dimensi sosial dan budaya, aksesibilitas yang baik dapat memperluas interaksi antara wisatawan dengan masyarakat serta memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada pengunjung. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap identitas budaya yang dimiliki. Namun, apabila jumlah kunjungan tidak dikelola dengan baik, aktivitas wisata dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terganggunya privasi masyarakat, perubahan fungsi ruang, konflik sosial, hingga berkurangnya makna budaya akibat pertunjukan yang hanya berorientasi pada kebutuhan wisatawan. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan jalur kunjungan, penentuan waktu operasional, penyusunan tata tertib wisata, serta penyampaian informasi mengenai nilai-nilai budaya lokal agar

kegiatan pariwisata tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya desa (Suhandi dkk, 2022).

Dalam dimensi lingkungan, aksesibilitas memiliki dua sisi yang perlu dikelola secara seimbang. Di satu sisi, infrastruktur akses yang memadai dapat mendukung pengawasan kawasan wisata, mempermudah proses evakuasi ketika terjadi keadaan darurat, memperlancar pengelolaan sampah, serta membantu pemerataan distribusi wisatawan pada berbagai titik atraksi. Namun di sisi lain, peningkatan akses juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan berupa meningkatnya emisi kendaraan, kerusakan habitat, erosi jalur wisata, peningkatan konsumsi air, serta bertambahnya volume sampah. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan aksesibilitas tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuannya menjaga daya dukung lingkungan melalui pengendalian jumlah kendaraan, pengelolaan sampah, pengaturan arus wisatawan, dan penerapan kuota kunjungan pada kawasan yang rentan terhadap kerusakan.

Pada dimensi kelembagaan, pengembangan aksesibilitas memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dinas

pariwisata, dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, pelaku usaha transportasi, pemilik lahan, serta masyarakat. Kerja sama antar pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur berjalan secara berkelanjutan. Tanpa pembagian peran yang jelas dan dukungan pendanaan yang memadai, fasilitas yang telah dibangun berpotensi mengalami kerusakan dan informasi pelayanan menjadi tidak terbaru. Penelitian di Desa Wisata Ngargoretno menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan perlu berjalan seiring dengan peningkatan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat agar pembangunan desa wisata dapat berlangsung secara berkelanjutan (Marhesa dkk, 2024).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas dalam pengembangan desa wisata merupakan konsep multidimensi yang tidak hanya terbatas pada kemudahan mencapai lokasi wisata, tetapi juga mencakup konektivitas transportasi, akses informasi dan digital, keterjangkauan waktu dan biaya, keamanan, kenyamanan dan inklusivitas, serta tata kelola yang mendukung keberlanjutan destinasi. Keenam dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan wisata, memperluas manfaat ekonomi masyarakat, memperkuat pelestarian sosial budaya, menjaga daya

dukung lingkungan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan desa wisata.

Penelitian ini memberikan sintesis konseptual mengenai dimensi aksesibilitas yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan evaluasi pengembangan desa wisata berkelanjutan. Pengembangan aksesibilitas hendaknya tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan aspek pelayanan, digitalisasi, inklusivitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsa, A., Verawati, D. M., & Hutajulu, D. M. (2024). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Magelang. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, Vol. 5, No. 2, 221–236.
- Azizi, E. S., Cahyaningsih, A. F., Jaya, G. H., & Permana, F. (2025). Dampak Atraksi dan Aksesibilitas terhadap Minat Kunjungan Wisatawan di Desa Wisata Sembungan Kabupaten Wonosobo. *Tamasya: Jurnal Pariwisata Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 156–167.
- Budiarta, I. W., Kasni, N. W., Pulawan, M., & Laksmi, P. A. (2023). Pengembangan Desa Wisata Penglipuran Menuju Desa Wisata Berkelanjutan. *Jurnal Abdidias*, Vol. 4, No. 5, 389–397.

- Delamartha, A., Yudana, G., & Rini, E. F. (2021). Kesiapan Aksesibilitas Wisata Dalam Mengintegrasikan Obyek Wisata (Studi Kasus : Karanganyar Bagian Timur). *Jurnal Plano Buana*, Vol. 1, No. 2, 78-91.
- Herman, Rizkiyah, P., Widjaja, H. R., & Junaid, I. (2023). Determinant Factors in Managing Tourism Village : A Destination Attributes Approach. *Jurnal Kepariwisata : Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, Vol. 7, No. 1, 67-80.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2019). PEDOMAN DESA WISATA . Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman.
- Marhesa, R. H., Hakim, L., & Pangestuti, E. (2024). Analisis keberlanjutan Desa Wisata Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, Vol. 14, No. 1, 25–34.
- Napu, D. M., Nurhidayat, W., Zahra, G. A., Hanifa, L. A., & Rakhmah, D. (2024). Optimasi Aksesibilitas Desa Wisata Pakualam Kecamatan Darmaraja Sumedang Guna Meningkatkan Minat Kunjungan Wisata Edukasi. *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Borneo*, Vol. 5, No. 1, 63-75.
- Purnama, A., & Ardiansyah, I. (2024). Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan Di Desa Wisata Batulayang Cisarua Kabupaten Bogor. *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 6, No. 1, 1266-1284.
- Rahayu, Y. P., Nurkukuh, D. K., & Fathurrohman, S. (2024). Kajian Aksesibilitas Desa Wisata di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal MATRA*, Vol. 5, No. 1, 1-12.
- Rahmat, I., & Cahyadi, A. (2019). Desa Wisata Berkelanjutan Di Nglanggeran : Sebuah Taktik Inovasi. *Jurnal Pariwisata Pesona*, Vol. 4, No. 1, 1–10.
- Ritzkal, Karbella, M., & Amalia, N. R. (2018). Pengembangan Objek Wisata Curug Saderi Dan Camping Ground Di Desa Ciasmara. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 2, No 3, 308-315.
- Sim, E. N. (2025). Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata Batu Lintang Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. *FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, Vol. 23, No.1, 272-286.
- Suhandi, A. S., Novianti, E., Oktavia, D., Khan, A. M., & Simatupang, W. P. (2022). Community Participation Process in Community-Based Tourism Development in Waerebo Traditional Village, Manggarai Regency, Flores. *ASEAN : Journal On Hospitality and Tourism*, Vol. 20, No. 2, 67-82.
- Wulandari, I., Meidiana, C., & Prayitno, G. (2025). Tourism Component Development Of Jambu Tourist Village Kayenkidul District Kediri Regency. *Jurnal Tata Kota dan*